

Politik sebagai Perjuangan atau Pengeboran?

R. William Liddle

Dalam orasi ilmiahnya, Goenawan Mohamad merumuskan sebuah peta politik tempat perjuangan merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai kesetaraan sosial. Hal itu berlaku dalam sistem kenegaraan apa pun, termasuk demokrasi. Bagi saya, masalahnya tidak sesederhana itu. Ketimbang perjuangan, saya lebih suka menggunakan metafor pengeboran, yang saya pinjam dari Max Weber, sosiolog Jerman awal abad ke-20: "Politik adalah pengeboran kayu keras yang sulit dan lama" (*Politics is a strong and slow boring of hard boards*).

Goenawan mempersoalkan demokrasi dari dua segi. Sebagai tata politik yang "mendasarkan diri pada sebuah suara terbanyak atau sebuah konsensus," demokrasi tidak mungkin mewakili semua aspirasi atau tuntutan masyarakat. "Maka ia tampak sebagai sesuatu yang tak hendak membuka diri pada alternatif-alternatif baru." Buktinya adalah Jepang di bawah kekuasaan Partai Liberal De-

mokrat selama puluhan tahun serta Spanyol, tempat Partai Sosialis yang mendirikan demokrasi di negara tersebut berangsur-angsur menjadi partai kapitalis dan pro-NATO.

Presiden terpilih Amerika Serikat Barack Obama pun digambarkan sebagai seorang politisi yang terkurung oleh sikap mayoritas pemilih yang tidak menginginkan perubahan-perubahan besar. Sebagai contoh: posisi-posisi Presiden George W. Bush terhadap sengketa Israel-Palestina, pemilikan senjata api pribadi oleh masyarakat Amerika, dan perang "sebagai kegagahan patriotik, bukan kekecaman" akan dipertahankan oleh Presiden Obama. Obama "akan tampil sebagai si pembangun konsensus."

Dalam bentuk konkretnya di Indonesia pasca-Orde Baru, ciri-ciri demokrasi yang mencolok bagi Goenawan adalah korupsi anggota-anggota DPR dan partai-partai yang tidak punya tujuan jelas, kecuali keinginan para pemimpinnya untuk mendapatkan kursi. Alhasil, Indonesia sudah memasuki suatu era baru tempat para pemilih "akan mencemooh, bahkan mencurigai" pemimpin politiknya. Kalau keadaan ini dibiarkan berlanjut, demokrasi pasti semakin sulit dipertahankan. Solusi Goenawan: "Satu-satunya jalan yang masih terbuka adalah selalu dengan setia mengembalikan politik sebagai perjuangan, ...baik melalui perundang-undangan atau justru melawan perundang-undangan, baik melalui partai ataupun melawan partai".

Rumusan Goenawan menarik baik sebagai analisis maupun sebagai *call to action*, panggilan untuk bertindak. Siapa pun akan mengakui bahwa demokrasi yang responsif dan bertanggungjawab belum terwujud di Indonesia dan kualitasnya belakangan agak merosot di negara-negara seperti Jepang, Spanyol, dan Amerika. Namun demikian,

bagi saya, Goenawan terlalu menekankan peran gerakan atau mobilisasi dari luar sistem demokrasi sebagai solusinya. Perjuangan malah dipertentangkan dengan demokrasi, seakan-akan lembaga-lembaga demokrasi tidak dengan sendirinya dinamis, tidak terbuka kepada tuntutan dari masyarakat. Atau seakan-akan kita masih hidup di zaman Pergerakan, ketika lembaga-lembaga penjajahan memang harus dilawan dengan perjuangan. Pada zaman Reformasi, lembaga-lembaga pemerintahan justru terdiri dari unsur-unsur demokratis yang memungkinkan dan mendorong perubahan. Perjuangan tentu memainkan peran, tetapi itu harus dipandang sebagai satu bagian dari seluruh sistem demokrasi.

Dalam rangka itu, Goenawan terlalu menekankan peran konsensus sebagai tujuan demokrasi yang menghambat *difference*, perbedaan. Setidak-tidaknya, di negeri saya yang sudah lama demokratis, belum pernah ada konsensus tentang hal-hal penting (misalnya tentang peran agama dalam politik). Yang sering ada adalah mayoritas besar yang mendukung suatu posisi atau kebijakan (misalnya, sebelum pemerintahan George W. Bush, pemisahan negara dari lembaga-lembaga agama).

Tetapi mayoritas itu selalu dilawan oleh satu atau sejumlah minoritas dengan cita-cita lain (misalnya, Kristenisasi negara, seperti tertera dalam anggaran dasar Partai Republik negara bagian Texas). Tak kalah penting, hampir setiap mayoritas dan minoritas terdiri dari kelompok-kelompok lebih kecil yang punya tuntutan dan kepentingan masing-masing. Hal ini juga merupakan sumber dinamisme politik (misalnya sayap kanan kaum Evangelis Protestan yang mendukung calon presiden John McCain dan sayap kiri yang mendukung Obama dalam pemilihan 2008).

Tanggapan saya terhadap rumusan Goenawan tentu dipengaruhi oleh pengalaman saya belakangan ini sebagai warga negara Amerika. Setelah pemilihan presiden 2008, setiap kali saya melihat wajah Barack Obama (yang Amerika-Afrika), saya teringat kepada apa yang dimungkinkan oleh demokrasi. Saya juga teringat kepada metafor Max Weber tentang politik sebagai pengeboran kayu keras yang sulit dan lama, seperti saya kutip di atas. Kemenangan Obama tentu merupakan hasil perjuangan, tetapi hal itu harus juga dilihat sebagai hasil perbuatan para politisi demokratis yang bertindak di dalam sistem. Kedua-duanya, peran gerakan dan peran politisi demokratis, berakar dalam sekali dalam sejarah politik Amerika.

Pada awal abad ke-19, John Brown membangun sebuah gerakan anti-perbudakan yang memainkan peranan penting dalam politik Amerika sebelum Perang Saudara berlangsung di negara kami. Oleh Abraham Lincoln, Brown dijuluki "fanatik sesat." Tetapi Lincoln sendiri melawan perbudakan dan, sebagai presiden, terus-menerus mencari akal untuk mengakhiri "lembaga terkutuk" itu. Pendekatan Lincoln dijelaskan dengan baik oleh Garry Wills, yang menulis buku tentang kepemimpinan presidensial, sebagai berikut: "Dengan tindakan-tindakan politik yang sangat hati-hati dan terjaga, Lincoln sedikit demi sedikit memaksa rakyatnya untuk mengambil langkah-langkah kecil untuk mengatasi masalah yang sebenarnya."

Pada abad ke-20, peran Brown dan Lincoln disusul oleh banyak orang, hitam dan putih, yang menjadi pemimpin organisasi sosial dan partai politik serta pegawai dan pejabat pemerintah. Selaku pemilih dalam pemilihan umum, orang Amerika-Afrika sudah menjadi faktor penting di negara bagian-negara bagian utara sebelum

Perang Dunia II. Kebijakan Presiden Franklin Roosevelt (1933-1945) dan Presiden Harry Truman (1945-1953), kedua-duanya Demokrat dari utara, dipengaruhi oleh faktor itu. Keputusan-keputusan yang paling penting diambil oleh Presiden Lyndon Johnson (juga dari Partai Demokrat) pada 1964 dan 1965, ketika beliau menandatangani dua undang-undang yang melarang segala bentuk segregasi berdasarkan ras dan menjamin hak setiap warganegara untuk memilih dalam pemilihan umum.

Barack Obama mewarisi sejarah ini dalam dua pengertian. Pencalonannya oleh Partai Demokrat dan kemenangannya dalam pemilihan umum dimungkinkan oleh perbuatan-perbuatan Presiden-Presiden Lincoln, Roosevelt, Truman, dan Johnson yang membuka kesempatan bagi orang-orang Amerika-Afrika untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Kedua, Obama mencari kekuasaan untuk memerintah, bukan untuk menjadi orang yang terpandang. Selama kampanyenya dia berusaha keras untuk merumuskan sebuah visi atau garis besar kebijakan negara seandainya dia bakal terpilih. Seperti banyak pendahulunya (termasuk beberapa presiden dari Partai Republik, seperti Dwight Eisenhower, Richard Nixon, dan Ronald Reagan), Obama ingin melakukan sesuatu yang positif buat bangsa dan dunia.

Pada saat yang sama dia menyadari bahwa dia harus bersikap dan bertindak realistis, "politik". Setiap kebijakannya akan dibentuk dalam sebuah konteks politik yang mengandung banyak *opportunities*, kesempatan, tetapi sekaligus sarat dengan *constraints*, kendala. Kesempatan dan kendala ini terdiri antara lain dari lembaga-lembaga pemerintahan, seperti pembagian kekuasaan yang ditentukan oleh konstitusi, serta sistem kepartaian kami. Lagi

pula, setiap kebijakan akan berdampak juga pada posisi dan pengaruhnya kemudian. Pendek kata, keberhasilan atau kegagalan Presiden Obama akan ditentukan oleh kecanggihan politiknya ketika dia memilih kebijakan-kebijakannya.

Apakah orang Indonesia bisa belajar dari sejarah ini? Jawaban saya adalah ya, tetapi saya khawatir jawaban Goenawan adalah tidak, sebab kerangka analitisnya terlalu mengandalkan para pejuang di luar sistem. Tanpa mengabaikan peran positif kaum pejuang, fokus utama kita (pengamat dan aktivis) seharusnya diarahkan kepada aktor-aktor pokok: pejabat pemerintah pusat (termasuk hakim dan jaksa), pemimpin partai, dan anggota badan-badan legislatif. Tak kalah penting, pemerintahan daerah juga ikut menikmati proses demokratisasi di zaman Reformasi ini. Pemerintah-pemerintah daerah, di tingkat kabupaten dan kota, adalah lembaga demokratis yang paling dekat kepada masyarakat. Bagi saya, keberhasilan atau kegagalan demokrasi di Indonesia akan lebih ditentukan oleh tingkah-laku politisi kabupaten dan kota ketimbang para pejuang di luar sistem. Akan tetapi, mengingat sekali lagi kata-kata Max Weber, jangan terlalu berharap dalam waktu singkat. Kayu Indonesia pasti tidak kalah keras dibanding kayu Amerika.***

Mengaktifkan Politik

Rocky Gerung

Pidato Goenawan Mohamad (GM) menyentuh kondisi teoretis dari filsafat politik. Yaitu "ketakcukupan" demokrasi sebagai peralatan untuk menghasilkan "perubahan radikal". Kritik ini adalah khas "etika politik kiri". Karena jalan pikiran itu, GM sempat berpikir bahwa demokrasi mengandung disilusi di dalam dirinya.

Memang, dalam praktik, demokrasi lebih sering berhenti dalam "pelembagaan formal", ketimbang mensponsori "revolusi". Saya kira, dalam kondisi reformasi sekarang ini, kita harus menerangkan juga demokrasi dari sudut pandang kebutuhan kontemporer kita untuk menghalangi pemaknaan "The Real" ("Sang Antah"—dalam istilah GM), dari kemungkinan pengisiannya secara absolut oleh politik doktrinal, politik fundamental. Jadi, secara strategis, ada kebutuhan "politico-historis" yang lebih mendesak, di samping kebutuhan "filosofis" mempersoalkan struktur metafisik dari teori demokrasi.

GM telah mengucapkan sesuatu yang lebih "kontemplatif". Karena itu, tanggapan saya sebaiknya yang lebih bersifat "mengaktifkan" demokrasi. Terimakasih.